



ASEAN PARLIAMENTARIANS FOR HUMAN RIGHTS

Anggota DPR RI Menyerukan Tindakan Segera untuk Menghentikan Memburuknya Keadaan di Rakhine State

JAKARTA, 11 September 2017—Anggota DPR lintas partai menyerukan aksi bersama seluruh anggota parlemen terkait tindakan yang harus segera diambil untuk mengakhiri tragedi yang terjadi di Rakhine State, Myanmar. Mereka menyerukan kepada pemerintah untuk mengusahakan tindakan serius untuk membantu penyelesaian krisis tersebut, termasuk dengan mengajukan isu ini kepada para pemimpin negara-negara ASEAN sebagai salah satu agenda penting ASEAN.

“Kita sedang menjadi saksi atas sebuah bencana kemanusiaan dalam skala yang belum pernah kita lihat sebelumnya, terjadi di Rakhine State. Jumlah korban atas tragedi ini sangat memprihatinkan dan penderitaan mereka tidak dapat dibiarkan. Kita tidak bisa hanya duduk dan melihat tragedi ini terjadi di halaman belakang kita”, kata Eva Kusuma Sundari, wakil rakyat dari fraksi PDI-P yang juga duduk sebagai Anggota Dewan APHR (ASEAN Parliamentarians for Human Rights/ Persatuan Anggota Parlemen di ASEAN untuk Hak Asasi Manusia).

Hampir mendekati 300.000 orang Rohingya mengungsi ke Bangladesh sejak militer Myanmar memulai “operasi pembersihan” di bagian utara Rakhine State pada tanggal 25 Agustus sebagai balasan atas serangan terhadap pos polisi oleh milisi Rohingnya. Puluhan ribu non-muslim juga ikut diusir dari rumahnya sebagai balasan dari serangan tersebut. Gambaran satelit menunjukkan api yang menyebar ke seluruh desa-desa. Para penyintas juga menceritakan kisah-kisah mengerikan tentang pembunuhan massal dan kekerasan seksual. Laporan yang dapat dipercaya juga menyebutkan bahwa militer Myanmar juga menggunakan ranjau darat di area dekat perbatasan Bangladesh.

“Pemerintah Indonesia perlu mengerahkan lebih banyak sumber daya dalam diplomasi untuk menghentikan tragedi yang mengarah pada pembersihan etnis. Pemerintah harus menaikkan tekanan pada militer Myanmar untuk mengakhiri pembantaian, pembakaran, dan pengusiran massal. Usaha-usaha tersebut harus diarahkan kepada Pemimpin (Commander in Chief) Min Aung Hlaing yang bertanggung jawab atas militer Myanmar. Dia adalah orang yang punya kuasa untuk mengakhiri horor ini”, kata Sundari.

Pada tanggal 4 September, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengunjungi Naypyitaw, Myanmar dan bertemu dengan Min Aung Hlaing, dan juga Kanselir Negara Aung San Suu Kyi, yang secara de facto adalah kepala pemerintahan sipil, untuk mendiskusikan situasi ini. Pada hari yang sama, Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan yang menyerukan kepada komunitas internasional untuk bekerja bersama untuk merespon krisis kemanusiaan ini. Para anggota DPR menyatakan bahwa langkah-langkah tersebut adalah langkah awal yang penting, namun aksi lebih lanjut harus diambil, termasuk dengan mendorong ASEAN untuk membahas isu ini.

“Memberikan bantuan kemanusiaan adalah penting, tapi para pimpinan negara harus menyadari bahwa penderitaan orang-orang Rohingnya hanya akan berhenti jika militer Myanmar menghentikan serangan mereka. Indonesia harus memenuhi tugasnya sebagai pemimpin regional dengan mengajukan isu ini untuk dimasukkan ke dalam agenda ASEAN sebagai sebuah hal mendasar untuk kedamaian dan keamanan regional” tambah Sundari

“ASEAN telah menjadi kekuatan untuk perdamaian di wilayah kita selama beberapa dekade. Jika gagal mengatasi krisis Rohingnya sekarang, akan menghalangi kesempatan penting untuk melanjutkan warisan tersebut dan menempatkan keamanan wilayah yang lebih luas dalam resiko. Indonesia harus meyakinkan sesama negara ASEAN mengenai implikasi kegagalan bertindak”, kata Akbar Faisal dari Fraksi Nasdem.

“Hal ini bukanlah masalah agama. Ini adalah masalah kemanusiaan utama dan merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia,” kata Henky Kurniadi dari Fraksi PDI-P.

Para anggota DPR menyerukan agar pemerintah Myanmar dan militer Myanmar berkomitmen untuk mengaplikasikan rekomendasi dari Komisi Pendampingan pada Rakhine State yang dikepalai oleh mantan Sekjen PBB, Kofi Annan, sambil mendesak Pemerintah Indonesia untuk mendukung proses tersebut.

“Kita punya dasar resolusi jangka panjang dalam rekomendasi yang diberikan Komisi yang dikepalai oleh Kofi Annan. Untuk sampai pada akar permasalahan dan mengangkat isu seperti kewarganegaraan dan ketergantungan antar-kelompok adalah penting. Tapi pertama-tama, pembunuhan dan pengusiran harus dihentikan” kata Siddiq, anggota dewan dari PKS.

Para anggota DPR menyatakan bahwa sudah bertahun-tahun tekanan diterima oleh orang-orang Rohingnya di Myanmar, dan kegagalan yang terus-menerus dari pemerintah yang didukung militer untuk mengatasi konflik, juga berkontribusi pada krisis yang terjadi saat ini.

Selama bertahun-tahun, orang-orang Rohingnya di Myanmar menghadapi tekanan yang didukung oleh negara dan dilakukan secara sistematis dan dilakukan oleh institusi negara yang melanggar hak-hak mereka.

Ratusan ribu dari mereka telah terusir dari rumah sebelum krisis ini dimulai, dan sekarang kita melihat situasi yang lebih parah dalam level yang tak terbayangkan” kata Yaqut Cholil Qoumas, anggota dewan dari PKB. “Dibatasi haknya untuk berkegiatan dan hak-hak dasar lainnya, dianggap tidak berkewarganegaraan oleh undang-undang kewarganegaraan yang menghalangi mereka—hanya karena latar belakang etnisitas—dari kesempatan mendapatkan kewarganegaraan secara utuh. Orang-orang Rohingnya sudah kehabisan waktu dan harapan untuk masa depannya,” tambahnya.

“Komunitas internasional lebih fokus pada transisi demokrasi dan pembangunan ekonomi daripada menghentikan pembunuhan, dan komunitas Rohingnya, bersama dengan etnis lain dan kaum beragama minoritas, membayar dengan harga yang tinggi” kata Kyaw Win, Direktur Eksekutif BHRN (Burma Human Rights Network/ Jaringan Hak Asasi Manusia Burma) yang berkantor pusat di Inggris, yang bergabung dengan para anggota dewan dari parlemen Indonesia untuk memberikan informasi perkembangan terbaru tentang situasi di

lapangan. "Reformasi demokrasi di Myanmar sudah secara total keluar dari jalur dengan adanya kekerasan ini. Pembunuhan harus dihentikan".